



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DINA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Penyusunann Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan ketenagakaerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 ini .

Perubahan Renja disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan seluruh kepentingan OPD. Perubahan Renja bertujuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, agar pelaksanaannya sesuai dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Perubahan Renja merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Perubahan Renja instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Akhirnya, segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Perubahan Renja saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan kita sesuai dengan Perubahan Renja yang telah disusun ini. Semoga Rancangan Renja ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait.

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

SITI AWAN, SH.,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630109 198303 2 003

DAFTAR ISI

KATA PE	NGAN	TAR
DAFTAR	ISI	
BAB I	PE	NDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EV	ALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD
		Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	2.3	Isu – isu Penting Penyelenggaraan
		Tugas dan Fungsi SKPD
	2.4	Review Terhadap Rancangan RKPD
	2.5	Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TU	JUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
	3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	Re	ncana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB V	Pe	nutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Adapun yang menjadi acuannya adalah Renja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisifasi masyarakat.

Menindaklanjuti Undang - undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Derah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam peraturan daerah tersebut di uraikan bahwa OPD yang membidangi urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kedudukan, organisasi, tata kerja dan uraian tugas pokok dan fungsi ditetapkan melalui peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 34 Tahun 2016.

Mewabahnya Covid -19 (Corona Virus Desiase-19) yang melanda seluruh dunia membuat perekonomiam di Indonesia Mengalami Kontraksi Paska Penerbitan Peraturan Perpres 54 Tahun 2020 yang mengatur Mengenai Perubahan Postur APBN 2020,Pemerintah Pusat melakukan Penghematan belanja Pemerintah melaksanakan recfocusing Anggaran untuk Percepatan Penanganan Wabah Virus corona (COVID -19)

Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widido agar seluruh APBN dan APBD yang tidak Prioritas untuk dipotong dan memprioritaskan anggaran untuk Penanganan COVID - 19.Pemerintah Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan recfocusing

anggara. Akibat recfocusing anggaran yang dilaksanakan menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan suatu Dinas yang membantu Bupati di Bidang Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembangunan seperti penataan struktur Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan pengembangan sentra Koperasi,UKM dan Ketenagakerjaan yang potensial. Kembangunan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan.

Atas dasar dan tujuan diatas maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Padang Lawas Utara perlu menyusun "Renja" yang sinergik, strategi dan kronologis sebagai pedoman dalam tugas pokok dan fungsi selama satu tahun kedepan yang penyusunannnya tetap mengacu pada RENSTRA OPD dan RKPD Padang Lawas Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanagn Dearah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dann Valudasi Pemutahran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanagn Daerah

 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai Penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan. Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah:

- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Keenagakerjaan
- 2. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan SAKIP
- Mengetahui Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020 Dina Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

1.4 TEMA, PRIORITAS, DN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Visi : Bersama MembangunMasyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat

Misi 1 : Mewujudkan sistem Pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebij
1.	Meningkatkantata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya pelayananpubl ik prima Pemerintah Daerah	Penerapan Aplikasi umum guna mendukung adminstrasi perkantoran (e-office,e-SPPD, dll)	Implementasi Pela Government di lin pemerintah daerah

Misi 8:Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	Meningkatkan Koordinas Lintas Sektor Informasi pasar kerja			
	3. Terpenuhinya		3. Mengoptimalkan Pelatihan			

	Kesempatan Kerja		
Peningkatkan Perlindungan dan	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Penetapan UMKab	Penerapan berbagai peraturan tentang penetapan upah
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaa	2. Tersedianya Data Potensi EksTransmigrasi	2.Tersedianya data base Tenaga Kerja	Melakukan pendataan tenaga kerja dan meningkatkan koordinasi dengan BPJS
n serta Transmigrasi		3.Peningkatan kerjasama dengan BPJS 4. Tersedianya data eks transmigrasi	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka pendataan potensi eks transmigrasi

Misi 12 : Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usahausaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
2.	Meningkatkan Pemberdayaan,	Terciptanya Lembaga dan	Melakukan Bimtek	1.Perumusan Kebijakan			
	Pengembangan, dan Kualitas	KUKM yang Berkualitas	2. Melakukan Pelatihan	2.Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor			
	Kelembagaan		3.Melakukan				
	Koperasi dan		Pengawasan	3.Meningkatkan Kerjasama			
	UMKM			Jejaring Kemitraan			
			4.Melakukan Pembinaan dan Pendampingan				
			5.Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung serta				

Promosi Produk UKM	
6. Pendataan	

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 disusun dengan Sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi Menjelaskan Mengenai gambaran umum Penyusunan Perubahan Renja OPD agar bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021), Mengacu Pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Perubahan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaikan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja OPD Tahun - tahun Sebelumnya.

Bab III. Tujuan, Sasaran

Bab ini Memuat Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang diinginkan, memilih dan menetapkan program yang ingin ditinggkatkan Kinerjanya.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik daam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan ,kaidah- kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara dari satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan berdasarkan, azas otonomi, dan tugas pembantuan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 masih sangat terbatas dan belum mewakili seluruh kegiatan yang ada. Diharapkan Program Kegiatan Tahun berikutnya akan semakin menggambarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Review Rancangan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra OPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD. Adapun hasil Evaluasi Renja tahun 2020 dan Realisasi Renstra OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagkerjaan yang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana tabel rekapitulasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan.

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realosasi Kinerja
91 ≤	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi

66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN % KINERJA	PENYERAPAN ANGGAAN	TINGKAT EFISIENS (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima Pemerintah Daerah	Persentasi Keputusan Masyarakat	99,15	97,17	2,83
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentasi Pencari Kerja dan Tenaga Kerja Yang Dilatih	100,00	100,00	0,00
3	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentasi Tenaga Kerja yang Produktif	0	0,00	0,00
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentasi Pencari Kerja yang ditempatkan	107,37	0.00	0,00
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya UMKab Persentasi Pekerja/Buruh yang Persentasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (HI)	100,00 120,13 100,00	99,34 100,00 0.00	0,66 0,00 0,00
6	Tersedianya Data Potensi Eks Trasmigrasi	Persentasi data Potensi eks trasmigrasi	10,00	0.00	0.00

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaaan Kabupaten Padang Lawas Utara

		Tumbuhnya Koperasi Baru	150,00		0,00
7	Terciptanya Lembaga dan	2. Tumbuhnya UMKM Baru	7,500	0,00 0,00	0,00
7	UKMKM yang Berkualitas	Persentasi Data KUMKM	92,30	99,14 0,00	0,00 0,86
		Persentasi Pelaku KUMKM yang Kompeten	92,30	0,00	0,00
		Persentasi Bantuan Saran dan Prasarana	100%	0,00	0,00
		6. Promosi Produk KUMKM	0	0,00	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu analisis dengan melibatkan seluruh Stake Holders melalui diskusi dua arah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam segi pelayanan, telah mengikuti dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal terhadap penanganan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan analisa terhadap kondisi internal dan eksternal yang pada dalam Perkembangan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

Analisis Lingkungan Internal

- 1.1. Kekuatan (strengths)
 - Tersedianya pranata hukum (Perda dan Surat Keputusan);
 - b. Tersedianya Anggaran;
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- 1.2. Kelemahan (weaknesses)
 - a. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung
 - System Pengendalian dalam Pengawasan Badan Hukum ;

- Masih kurangnya kwalitas dan kwantitas Sumber Daya Manusia Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- d. Belum sepenuhnya Program / Kegiatan yang dilaksanakan mengacu Kepada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan

2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1. Kesempatan (opportunities)

- Adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Keinginan pelaku Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Usahanya;

2.2. Ancaman (threats)

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Kurangnya Kemampuan Masyarakat dalam berdaya saing
- Adanya kebijakan teknis dari lintas sektoral yang mempengaruhi Koperasi,
 UKM dan Ketenagakerjaan

3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kualitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dengan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait;
- Adanya system yang mendukung dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi
 Usaha kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

TABEL T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO		SPM/		Target	Renstra P	erangkat (Daerah	Reali Capa		Proy	reksi	Cata
NO	Indikator	STANDAR NASIONAL	IKK	Tabun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	tan Anal sis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Koperasi Aktif	165	175	185	195	156	65	175	185	
1	KOPERASI		Jumlah Koperasi tidak Aktif	5	4	3	2	6	118	3	2	
	20 3400 (43 4600)		Jumlah Keseluruhan	170	179	188	197	162	183	178	187	
	USAHA KECIL		Jumlah UMKM	1	2	2	2	1	2	2	2	
2	DAN MENENGAH		Jumlah UKM	3000	4500	5000	7000	2492	350	4500	6000	
	Hubungan Industrial dan BPJS		Jumlah Sengketa Perusahaan pertahun	2	2	2	2	4	0	0	0	
3			Jumlah kasus yang diselesalakan dengan PB	2	2	2	2	4	0	0	0	
	100 mg/s		Jumlah buruh /buruh yang menjadi peserta Program jamsostek	9500	1000	10500	11000	8992	899 2	2500	3000	
			Jumlah pencari kerja yang terdaftar	365	400	420	450	206	432	400	420	
4	Tenaga Kerja		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	215	220	225	230	206	210	215	220	
			besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20	40	60	100	20		60	100	

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaaan Kabupaten Padang Lawas Utara

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas ketenagakerjaaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai fungsi yaitu:

- Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.
- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Menengah
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakaerjaan
- Pengelolahan urusan Kesektariatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan mempunyai Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menenfah dan Ketenagakerjaan. Untuk Menyelenggaran Fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengag dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas Melaksanakan Kewenangan di Bidang koperasi,UKM dan Keyenagakerjaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Renja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara. Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang lawas Utara. Program dan kegiatan ini

dilaksankan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rancangan Renja Pemerintah Daerah.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja dicapai oleh OPD dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ksegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan RKPD;
- Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
- Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan análisis;
- Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas OPD sudah termuat dalam rancangan RKPD.
- 5. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
- Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 7. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, telah dilakukan langkah berikut:
 - a. Mengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
 - c. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
- 8. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), telah dilakukan langkah

berikut:

- a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam renja RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra OPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
- b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
- c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
- d. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
- Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap renja RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menciptakan Perkembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yang sehat dan bersih, tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam melaksanakannya. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagkaerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara setiap tahunnya selalu memberikan Pembinaan dan Pengawasan kepada masyarakat. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang dapat menimbulkan dampak perekonomian telah dibuat kegiatan untuk merangsang masyarakat dalam gemar berkoperasi dan menciptakan usaha – usaha kemungkinan meningkatkan perekonomiannya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan bisa menambah / meningkatkan derajat ekomomi masyarakat dan pembangunan daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
- Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
- Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
- Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh OPD kabupaten/kota;
- Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten/kota; dan

 Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten/kota.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan pemerintah, bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

- Membangun komitmen aparatur daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai perwujudan dan fungsi Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat disamping sebagai Abdi Negara.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai bimbingan dan pelatihan tekhnis.
- Penguatan posisi tawar pengguna pelayanan masyarakat melalui pemberitahuan hak dan kewajiban pemberi dan pengguna jasa.
- Meningkatkan fungsi mekanisme penyampaiandan mengekspresikan ketidakpuasan atas penyelenggaraan pelayanan melalui penyusunan mekanisme dan pembentukan pelayanan pengaduan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam dokumen Perubahan Renja , Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah dan Ketenagakerjaan menetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Uaha Kecil dan Menengah.

3.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi tersebut di atas, tujuan pembangunan sektor Koperasi ,UKM dan Ketenagakerjaan adalah:

Sektor Koperasi

- Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Badan Usaha Koperasi
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi.
- d. Mengajak masyarakat mendirikan koperasi termasuk kepada kelompok ekonomi produktif
- Meyakinkan kepada masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat

Sektor UKM :

- Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Masyarakat
- b. Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah
- Meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah / swasta.
- Meyakinkan kepada masyarakat bahwa Usaha Kecil dan Menengah dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat
- e. Pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.

Sektor Ketenagakerjaaan

- a. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
- b. Memberikan Pengetahuan Kepada Pencari Kerja dengan Mengadakan Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan.
- c. Mengurangi Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja
- d. Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada
- e. Menyebarluaskan Informasi pasar kerja

3.2.2. Sasaran

- a. Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi
 Cooperative Minded)
- Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)
- Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
- Meningkatkan kualitas dan Produktivitas Ketenagakerjaan
- e. Memberikan Pengetahuan kepada pencari kerja dengan mengadakan kegiatan pelatihan Keterampilan
- Mengurangi penganguran dan memperluas lapangan kerja
- Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada
- Mengidentifikasi calon lokasi pemukiman transmigrasi
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi dan sekitarnya
- Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat eks Transmigrasi dengan Masyarakat Sekitar.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan maka program yang akan dilakukan adalah :

Program

- Program Penunjang Urusan Pemeritah Dearah Kabupaten/Kota
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4. Program Hubungan Industrial
- 5. Program Perkembangan UMKM
- 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro UMKM
- 7. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 8. Program Pendidikan dan Platihan Perkoperasian
- 9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan

- 1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasai Kinerja Perangkat Dearah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Deerah
- 4. Peyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
- 5. Pemeliharaan barang Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
- 6. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat dearah
- 7. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- 8. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Penesahan Peraturan Perusahaan pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya (satu) Dearah Kabupaten Kota
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang dukungan Melalui Pendataan, Kemitaan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan
- Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Dearah kabupaten/Kota
- Pendidiakan dan Pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota
- Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam kabupaten/Kota

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas Ketenagakejaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Untuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 ada 9 Program dan 14 Kegiatan . Program dan Kegiatan yaitu :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.06.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.06.01 Dinas Koperasi, Usaha Keci dan Menengah dan Keenagakerjaan

						URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIVATOR VINERIA			RE	NCANA TAHUN 2021		CATATAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHU 2022		
		ко	DE			PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGATAN	INDIKATOR KINERIA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERIA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	R PENTING	CAPAIAN KINERJA		DANA/ PAGU INDIKATIF	
			1			2	3	4 Kabupaten		5	6	7	8		9	10	
2	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Padang Lawas Utara	100	*	20.208.000	DAU		100	*	20.240.00	
2	17	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	jumlah dokumen renja	Kabupaten Padang Lawas Utara	10	dok		DAU		10	dok		
						Perangkat Daerah	jumlah dokumen LAKIP	Kabupaten Padang Lawas Utara	10	dok		DAU		10	dok		
2	17	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	Kabupaten Padang Lawas Utara	10	dok	11.538.000	DAU		10	dok	11.640.00	
2	17	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP	Kabupaten Padang Lawas Utara	10	dok	8.670.000	DAU		10	dok	8.600.00	
2	17	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	10	dok		DAU		10	dok		
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Padang Lawas Utara	12	bulan	135.720.000	DAU		12	bulan	185.060,000	
2	17	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	jumlah jasa pendukung ADM/Tekhnis Perkantoran	Kabupaten Padang Lawas Utara	156	08	135.720.000	DAU		144	ОВ	99.060.000	
2	17	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Padang Lawas Utara	7	org		DAU		10	org	86.000.000	
2	17	01	2	06		Administrari Umum Perangkat Dearah		Kabupaten Padang Lawas Utara			357.691.100	DAU				420.282.66	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kabupaten Padang Lawas Utara						3	jenis	45.000.00	
2	17	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	9	jenis	6.369.100	DAU		9	jenis	10.776.40	
2	17	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kabupaten Padang Lawas	27	jenis	38.340.500	DAU		27	jenis	57.085.060	
2	17	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	Kabupaten	3.040) kotak	27.381.600	DAU		3.040	kotak	45.280.00	
2	17	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah yang dicetak	Kabupaten Padang Lawas Utara	10	jenis	25.040.900	DAU		12	jenis	27.141.20	
							jumlah barang yang digandakan	Kabupaten Padang Lawas Utara		jenis		DAU			jenis		
2	17	01	2	06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan yang di bayar/ Diadakan	Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten	45	Media	24.000.000	DAU		45	Media	24.000.00	
2	17	01	2	06	09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Padang Lawas	12	bulan	20.000.000	DAU		12	bulan	20.000.000	
							jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten	12	bulan	216.559.000	DAU	ho-tonita	12	bulan	191.000.000	
2	17	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah materal yang disediakan	Padang Lawas Utara	2	Jenis	279.843.700	DAU		2	Jenis	276.683.96	
2	17	01.	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	Kabupaten Padang Lawas Utara	2	Jenis	1.786.000	DAU		2	Jenis	4.500.00	
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	jumlah pemakaian tenaga listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	9681	kwh	25.440.000	DAU		9681	kwh	18.036.00	
							jumlah pemakaian internet	Kabupaten Padang Lawas Utara	600	mbps	24.000.000	DAU		600	mbps	21.600.00	
2	17	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat Kebersihan	Kabupaten Padang Lawas Utara	27	jenis	5.417.700	DAU		27	jenis	9.347.96	
						Pemeliharaan Barang Milik	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Rabupaten Padang Lawas Utara	216	ОВ	223.200.000	DAU		216	ОВ	223.200.00	
2	17	01	2	09		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kenderaan dinas yang dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	2	Jenis	74.600.000	DAU		2	Jenis	99.900.00	
2	17	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan peroragan Dinas	jumlah kenderaan dinas yang dipelihara	Kabupaten Padang Lawas	2	Jenis	49.520.000	DAU		2	jenis	78.820.00	

							Prince Commence of the Commenc								
2 17	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Padang Lawas Utara	6	Jenis	25.080.000	DAU		6	Jenis	21.080.000
2 7	03				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Padang Lawas Utara	100	%	86.776.600	DAU		100	96	240.000.000
2 07	03	2	01	1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit										
					Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Servis HP	Kabupaten Padang Lawas Utara	16	Peserta				16	Peserta	70.000.000
	T	T				Jumlah Peserta Pelatihan Batako				-					
1	T	T				Jumlah Peserta Pelatihan Ke Jepang	Kabupaten Padang Lawas		Peserta	-	DAU		20	Peserta	35.000.000
1						Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Lidi Sawit	Kabupaten Padang Lawas Utara	20	Peserta	86.776.600	DAU		100	Peserta	
						Jumlah Peserta Bimtek Seleksi Pemagangan Ke Jepang	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta		DAU	,	100	Peserta	85.000.00
						Jumlah Peserta Pelatihan Membordir TK.Dasar,Lanjutan dan Mahir	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta	~					
						Jumlah Peserta kerajinan anyaman lidi Sawit bagi masyarakat eks Transmigrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta	-					
						Jumlah Peserta Pelatihan Menenun	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta		DAU		16	Peserta	50.000.0
						Jumlah Peserta Pelatihan Menyabion	Kabupaten Padang Lawas		Peserta		DAU		16	Peserta	
2 0	7 03				Program Penempatan Tenaga Kerja	Prersentase Pemenuhan Penempatan Tenaga Kerja		0	NEW Y		DAU				30.000.0
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi yang Disebarluaskan melalui media cetak	Kabupaten Padang Lawas Utara		Terbit	-					
					Job Fair	Jumlah Dokumen data base bursa tenaga kerja	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Dokomen						
+	+	-				Jumlah Fasilitasi pembentukan Bursa Kerja Khusus	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	BKK	-	DAU		1	ВКК	30.000.0
2 0	7 03			Samuel Services	Program Hubungan Industrial	Program Pemenuhan Hubungan Industrial		0		100.822.200	DAU				312.000.00
2 0	7 05	2	02	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Sosialisasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan HI	Kabupaten Padang Lawas Utara				DAU		100	Peserta	65.000.00
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang kepentingan di 1 (SATU) Daerah Kabupaten /Kota	Tersosialisasinya badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Kabupaten Padang Lawas Utara	5	Lokasi	-					
						Sirgenitas Pendataan Hubungan Industrial dan jamsostek	Kabupaten Padang Lawas Utara				DAU				
						PenetapanUpah Minimum Kabupaten Paluta	Kabupaten Padang Lawas	1	Dokomen	100.822.200	DAU		1	dok	115.000.0
						Tersedianya Jumlah data pekerja / buruh yang akurat	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Kegiatan	-	DAU		1	Kegiatan	55.000.0
						Sosialisasi K3	Rabupaten Padang Lawas Utara	100) Peserta		DAU		1	Kegiatan	77.000.0
						Jumlah LPK yang di bentuk	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LPK	-	DAU			1 LPK	- Annual Control of the Control of t
2 0	,				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pemenuhan Pembangunan Kawassan Transmigrasi									
					Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Pemindahan dan	jumlah dokumen	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	dok		DAU			1 dok	
					Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	-									

			-				Kabupaten					
2 2	7 0	8	1		Program Pengembangan UMKM	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM	Padang Lawas Utara		104.434.800	DAU		55.000.000
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skla Usaha Meniadi Usaha Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Bagi UMKM						
					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Prokduksi dan Pengolahan, Peasaran,SOM Serta Desain dan Tekhnologi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaana yang dilaksanakan	Kabupaten Padang Lawas Utara	з ИКМ	63.783.800	DAU	10 UKM	55.000.000
						Jumlah Peserta Sosialitasi Legalitas Usaha						
						jumlah dokumen						
						Jumlah Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk Bagi Usaha Kecil		1 Kegiatan	40.651.000			
2 1	7	,			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Usaha Mikro(umkm)	Kabupaten Padang Lawas Utara			DAU		270.000,000
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Tersedianya Dukungan Informasi/Penyediaan Permodalan						
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Meningkatkan Kemudahan Transaksi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro	Kabupaten Padang Lawas Utara	0 Kali Pameran	-	DAU	2 Kali 2 Pameran	145.000.000
						Terwujudnya Pengembangan dan Pemantapan Usaha Bagi KUMKM Melalui Srana dan Prasarana	Kabupaten padang Lawas Utara	0 ukm	1	DAU	5 UKM	25.000.000
		+				jumlah peserta sosialisasi izin usaha mikro kecil Terlaksananya Peringatan Hari	Kabupaten Padang Lawas Utara	0 Kecamata n		DAU	4 Kecamat an	
2 1	7 0	3			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	UMKM Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	0 Kegiatan	38.664.500	DAU	1 Kegiatan	100.000.000 43.659.364
2 1	7 0)3	2 0	1	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Jumlah Peseta Sosilisasi Prinsip- Prinsip Pemahaman Perkoperasian					40 Peserta	43.659.364
2 1	7 0	03	2 0	1 01	Kabupaten/Kota Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang- Undangan Kabupaten /Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi		16 Koperasi	38.664.500			i .
						Jumlah Model - model pola Pengembangan Koperasi						
2 1	7 0	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian			38.361.500			244.801.556

2 1	17	05	2	01	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kahuaaten /Kota							
						Sosialisasi Program Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Jumlah Bimtek Pengembanagn Kopantren Menjadi Koperasi Syariah	Kabupaten padang Lawas Utara	Kegiatan		DAU	1 Kegiatan	55.000.000
						Jumlah Dokumen data base UMM	Kabupaten padang Lawas Utara	Dokumen		DAU	3 Dokumen	45.000.000
						Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi di Kab. Paluta	Kabupaten padang Lawas Utara	Kegiatan	-	DAU	1 Kegiatan	144.801.556
						Jumah Peserta Bimtek Laporan Keuangan Koperasi		55 Peserta	38.361.500			
2 1	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		24.086.000	DAU		29.000.000
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan pertumbuhan jumlah koperasi melalui GAMASKOP	Kabupaten Padang Lawas Utara	3 Desa	24.086.000	DAU	3 Desa	29.000.000
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	JUMLAH						

BAB V PENUTUP

Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketragakaerjaan tahun 2022 yang disusun ini, merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan Ranwal Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk menjadi Pedoman, Pengusulan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan dalam pembangunan Daerah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renja Tahun 2022 adalah:

- Rancangan Awal Renja merupakan komitmen dan arah bagi seluruh aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas utara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Rancangan Awal Renja yang memuat Tujuan, Sasaran Program, dan Kegiatan harus dijadikan sebagai pedoman dan gerak langkah dalam melaksanakan tugas. Untuk itu integritas dan profesionalisme sumber daya manusia harus menjadi persyaratan utama.

Akhirnya, semoga Rancangan Renja ini dapat berjalan dengan baik dan jadi bahan masukan bagi instansi terkait.

DINAS

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

TAIKABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

SITI AWAN, SH.,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630109 198303 2 003

	SASARAN				KEGIATAN	200		
URAIAN	INDIKATOR	RENCAN A TINGKAT CAPAIAN	Program	URAIAN	INDIKATOR (KINERJA)	Satuan	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	Keterangan
-	2	3	4	5	9	7	80	6
	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	%00'99					%00'99	
Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	10,00%	Program Pelatihan Kerja dan	Pelaksanaan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Pelatihan Kerja dan	Persen	100,00%	
Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	%00'55	Produktivitas Tenaga Kerja	Berdasarkan Unit Nompetensi	Froduktivitās Lenaga Kerja		100,00%	
	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	%00'06					%88'86	
Meningkatkan Perlindungan dan Pengembanagn Lembaga Ketenagakerjaan	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	100,00%	Program Pemenuhan Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Pemenuhan Perjanjian Kerja bersama untuk Hubungan Industrial Perusahaan yang hanya (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial	Persen	100,00%	
Menngkatkan Pemberdayaan,Pengemba ngan,dan Kualitas,Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan dan Pembinnaan Koperasi	45,00%	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Pelatihan Pelatihan Perkoperasian 3. Program Bemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Kabupaten/Kota 2.Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabuoaten /Kota 3.Pembrdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Pemenuhan Perkoperasian Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan		85,50%	
	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha		Program Pengembangan		Persentase Pemenuhi Pengembangan UMKM		75,06	